

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU DI MTS UMMUL QURAA TEMBUNG

Tengku Darmansah¹, Fatin Syahirah², Lola Amalia Sibarani³,
Soleh Parlindungan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: teng kudarmansah@uinsu.ac.id¹, fatinsyahirah1250@gmail.com²,
sibaranilola@gmail.com³, solehtambak294@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) strategi implementasi kebijakan pendidikan dalam peningkatan mutu di MTs Ummul Quraa, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan (3) model implementasi kebijakan yang diterapkan di MTs Ummul Quraa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Hubberman. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi implementasi kebijakan dilakukan melalui penguatan manajemen sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi nilai-nilai keislaman, dengan tujuan jangka pendek meningkatkan mutu pembelajaran dan jangka panjang mencetak generasi unggul. (2) Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, disposisi positif dari guru dan staf, serta struktur organisasi yang efisien. (3) Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah kombinasi model langsung dan intuitif, dengan langkah-langkah yang jelas dan evaluasi berkala.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe (1) the implementation strategy of education policy in improving quality at MTs Ummul Quraa, (2) factors that influence policy implementation, and (3) the policy implementation model applied at MTs Ummul Quraa. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The research subjects consisted of principals and teachers. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Hubberman interactive analysis model. Data validity was tested through triangulation of techniques and sources. The results showed that (1) the policy implementation strategy was carried out through strengthening school management, increasing teacher competence, and integrating Islamic values, with the short-term goal of improving the quality of learning and the long-term goal of producing superior generations. (2) Factors that influence policy implementation include clear communication, availability of resources, positive disposition of teachers and staff, and efficient organizational structure. (3) The policy implementation model used is a combination of direct and intuitive models, with clear steps and periodic evaluations.

Keywords: Implementation, Education Policy, Education Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era kemajuan zaman. Tujuan pendidikan yang ideal membutuhkan keseriusan dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan, yang pada gilirannya mendukung kemajuan pendidikan di masa depan. Pendidikan tidak hanya menjadi elemen penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga memiliki dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap citra suatu bangsa.

Di Indonesia, ada berbagai permasalahan terkait pendidikan, salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan sarana serta fasilitas yang memadai. Meski demikian, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tetap konsisten. Berbagai program yang telah dilaksanakan memberi harapan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas pula, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Untuk membangun bangsa yang maju, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting, sehingga pendidikan memainkan peran yang sangat vital. Dalam konteks ini, sekolah diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul.

Penerapan desentralisasi dalam manajemen pendidikan memberi sekolah kebebasan dalam mengelola dan menentukan kebijakan tanpa terlalu bergantung pada sistem birokrasi sentralistik. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh desentralisasi, dibutuhkan strategi yang berbasis pada kemandirian melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan adanya otonomi sekolah, pihak sekolah dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (stakeholder) untuk meningkatkan peran serta sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pendidikan dan meningkatkan mutu lulusan.

Setiap sekolah memiliki cara dan strategi yang berbeda dalam mengelola pendidikan, tergantung pada kondisi siswa dan lingkungan sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Arcaro (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011: 90-91), peningkatan kualitas sebuah sekolah harus dimulai dengan kesepakatan bersama antara semua aktor di sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dewan sekolah, administrasi, siswa, dan komunitas sekolah. Komitmen bersama untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah sangat penting untuk mencapainya.

Arif Rohman (2009: 109) juga menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan seringkali muncul dari masalah yang ada dalam pendidikan, khususnya ketika terdapat kesenjangan antara tujuan ideal (*das sollen*) dan kenyataan yang ada (*das sein*). Kebijakan pendidikan diambil dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan mendekatkan dunia cita-cita dengan kenyataan yang ada.

Namun, implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dipilih harus dapat diimplementasikan dengan baik. Masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan bisa dianggap berbeda-beda oleh setiap pihak. Terkadang, masalah yang satu pihak anggap sebagai hambatan, bisa jadi justru menguntungkan pihak lain. Implementasi kebijakan juga berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para pelaku (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 41).

Apabila kebijakan tidak segera diimplementasikan, tingkat keberhasilannya tidak dapat diketahui secara jelas. Kebijakan yang hanya tersimpan dalam arsip tidak akan memberikan dampak positif. Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Arif Rohman (2009: 134), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berwenang, baik pemerintah maupun pihak swasta, untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut berupaya mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional dan berkelanjutan, serta mewujudkan perubahan, baik yang besar maupun kecil, sesuai dengan amanat kebijakan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian melalui pengamatan yang mendalam atau temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif juga mementingkan makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu yang lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Abdullah&Saebani, 2014: 75).

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan, sehingga diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi yang teliti dan penuh makna, namun juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka. Informasi yang didapat penulis dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya.

Adapun maksud dari kualitatif deskriptif adalah penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang akan diteliti. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang akan dikumpulkan adalah proses bukan produk. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan di MTs Ummul Quraa

Menurut Fattah (2013:8), strategi diartikan sebagai metode atau pendekatan yang diterapkan untuk menjamin mutu, baik dalam mengevaluasi kualitas proses (process quality) maupun kualitas hasil (product quality). Strategi ini dapat merujuk pada isi atau aspek yang menjadi fokus utama, serta diarahkan untuk mencapai sasaran mutu atau target standar nasional pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Strategi tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu a) strategi jangka pendek yang dirancang untuk 5 tahun dan b) strategi jangka panjang yang mencakup periode 15 tahun.

Strategi adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan penetapan tujuan jangka panjang bagi suatu organisasi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut, dengan didukung oleh alokasi sumber daya yang ada agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara optimal (Irene, 2011:98).

Grindle (Sudiyono, 2007: 77) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada proses penerjemahan keputusan politik ke dalam prosedur

birokrasi yang rutin, tetapi juga melibatkan aspek konflik, yaitu mengenai siapa yang mendapatkan apa dalam kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan ini bahkan dianggap lebih penting, dan mungkin lebih krusial, dibandingkan dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Rohman, 2009:134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di MTs Ummul Quraa, Strategi implementasi kebijakan pendidikan di MTs Ummul Quraa dilakukan melalui penguatan manajemen sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi nilai-nilai keislaman dalam seluruh aktivitas pembelajaran. Penguatan manajemen diwujudkan melalui pembagian tugas yang terstruktur dan pelibatan seluruh pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua, dalam mendukung kebijakan yang dirancang. Guru secara rutin diberikan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai keislaman menjadi inti dari setiap kebijakan pendidikan, diterapkan baik melalui mata pelajaran agama maupun kegiatan pembiasaan sehari-hari, seperti program tahfidz Qur'an, shalat berjamaah, dan pembinaan akhlak. Evaluasi terhadap kebijakan dilakukan secara berkala untuk memastikan program-program berjalan sesuai dengan visi madrasah. Dalam jangka pendek, strategi tersebut bertujuan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil akademik siswa. Sedangkan dalam jangka panjang, kebijakan diarahkan untuk mencetak generasi yang unggul secara intelektual dan berkarakter Islami, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terealisasi atau terlaksana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan di MTs Ummul Quraa

Menurut Subarsono (2008: 89) keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah salah satu teori implementasi (Subarsono, 2008: 89- 104).

1) Teori George C. Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan c) struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh

kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di MTs YP. Ummul Quraa bahwa, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di MTs Ummul Quraa dapat dilihat dari beberapa hal, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Pertama, komunikasi yang jelas antara pihak sekolah, guru, dan siswa sangat penting agar kebijakan dapat dipahami dengan baik. Meskipun sudah ada upaya untuk menyampaikan kebijakan melalui rapat atau pengumuman, terkadang masih ada siswa atau orang tua yang kurang memahami kebijakan, yang bisa menyebabkan salah paham atau penolakan. Kedua, sumber daya seperti kemampuan guru dan fasilitas yang tersedia juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Walaupun madrasah berusaha meningkatkan kualitas guru dengan pelatihan, kekurangan dana dan fasilitas sering kali menghambat kebijakan untuk dilaksanakan secara maksimal. Ketiga, disposisi atau sikap guru dan staf juga penting. Ada guru yang mendukung dan menjalankan kebijakan dengan baik, namun ada juga yang merasa terbebani atau tidak setuju, yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Terakhir, meskipun struktur organisasi di MTs Ummul Quraa sudah cukup jelas, prosedur yang rumit atau birokrasi yang panjang kadang menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan di MTs Ummul Quraa dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas, sumber daya yang cukup, sikap positif dari guru dan staf, serta struktur organisasi yang efisien. Meskipun ada tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang belum merata, upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan koordinasi di sekolah dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di MTs YP. Ummul Quraa

Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa ide, garis besar, diagram atau kondisi numerik, yang digunakan untuk memperjelas, mengklarifikasi, dan memperkirakan komponen dari suatu keadaan masalah instruktif untuk diperbaiki dengan mengirimkan proposal dan perkembangan kegiatan untuk mengatasi masalah yang meragukan dan menangkap mata publik. Model juga dapat melalui peningkatan kebenaran dari realitas yang dibahas (Asmad Hanisy, 2013). Kapasitas fundamental model di sini adalah untuk mempermudah klarifikasi ide. Dalam contoh tertentu, model bergantung pada hipotesis.

Ada dua model implementasi kebijakan pendidikan yang ampuh, yaitu model langsung dan model intuitif (Baedhowi, 2004: 47). Model langsung dalam pelaksanaan strategi merupakan tahapan dinamis yang signifikan, sedangkan tahapan pelaksanaan pendekatan secara teratur cukup menonjol untuk diperhatikan karena dipandang sebagai kewajiban dari pertemuan yang berbeda. Pencapaian eksekusi strategi bergantung terutama pada kemampuan unit pelaksana. Dalam hal pelaksanaan pengaturan gagal, seringkali agen (eksekutif) yang dituduh, karena dianggap perlu tanggung jawab, sehingga dianggap penting untuk melakukan upaya yang lebih baik untuk membangun batasan penyelenggaraan organisasi.

Sementara itu, model pelaksanaan strategi yang cerdas dipandang sebagai siklus yang unik, dengan alasan bahwa setiap pertemuan yang terlibat dengan pelaksanaan strategi dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Misalnya, ketika strategi pembelajaran Full Day School (FDS) dianggap oleh daerah setempat tidak memenuhi asumsi mitra. Ini menyiratkan bahwa berbagai tahapan pelaksanaan strategi FDS akan diselidiki, dinilai oleh pertemuan. Dengan tujuan agar kemungkinan, kualitas dan kekurangan dari setiap periode. Pelaksanaan dapat dikenali dan diperbaiki dengan cepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Model Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di MTs YP. Ummul Quraa, Madrasah menggabungkan dua cara dalam menjalankan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Pertama, di MTs Ummul Quraa menggunakan pendekatan langsung, di mana setiap kebijakan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Seperti, madrasah memberikan pelatihan kepada guru, memastikan metode pengajaran yang tepat diterapkan, dan melakukan pemantauan rutin agar tujuan yang diinginkan tercapai. Selain itu, di MTs Ummul Quraa juga menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Jika ada hal yang kurang efektif, perbaikan segera dilakukan. Dengan cara ini, MTs Ummul Quraa dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan terus meningkatkan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

Dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi implementasi kebijakan pendidikan di MTs Ummul Quraa dilakukan dengan penguatan manajemen sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas pembelajaran. Melalui langkah-langkah tersebut, madrasah berusaha menciptakan pembelajaran yang berkualitas baik dalam jangka pendek untuk meningkatkan hasil akademik siswa, maupun dalam jangka panjang untuk membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan berkarakter Islami. Evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian visi madrasah yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di MTs Ummul Quraa meliputi komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, disposisi positif dari guru dan staf, serta struktur organisasi yang efisien. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang belum merata, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan langsung dan fleksibel. Dengan model implementasi yang menggabungkan keduanya, madrasah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan terus meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi & Saebani, Beni Ahmad. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fattah, N. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam konteks penerapan MBS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hanisy, Asmad. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 48-63.
- Irene, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Y. B. (2011). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar.